

Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Dan *Citizenship Education Longitudinal Study (CELS)* Dalam Pembentukan Warga Negara Demokratis

Herdian Tria Wulan Sari^{a,1}, Dini Andreswari Prianbudi^{b,2}, Ade Irfan Maulana^{c,3}, Irawan Hadi Wiranata^{d,4}, Hamidah Ulfa Fauziah^{e,5}

^{a,b,c,d,e} Universitas Nusantara PGRI Kediri, Jl. Ahmad Dahlan No.76, Kota Kediri 64112, Indonesia

¹ herdiantriaws@gmail.com; ² diniprianbudi20@gmail.com; ³ adeirfanmaulana10@gmail.com;

⁴ wiranata@unpkdr.ac.id; ⁵ fauziah24ulfa@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<i>Sejarah Artikel:</i> Diterima: 23 April 2025 Direvisi: 4 Mei 2025 Disetujui: 29 Mei 2025 Tersedia Daring: 1 Juni 2025 <i>Kata Kunci:</i> Pendidikan Kewarganegaraan Kurikulum Merdeka Demokrasi CELS Pelajar Pancasila	Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang demokratis, aktif, dan bertanggung jawab. Penelitian ini berfokus pada implementasi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Merdeka serta membandingkannya secara konseptual dengan temuan dari <i>Citizenship Education Longitudinal Study</i>. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur terhadap dokumen kurikulum dan hasil-hasil studi pendidikan kewarganegaraan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka telah mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia melalui pembelajaran berbasis proyek, penguatan Profil Pelajar Pancasila, serta pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif. Sementara itu <i>Citizenship Education Longitudinal Study</i>, menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual dan berkelanjutan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran demokratis peserta didik. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam kurikulum, bila disertai strategi pembelajaran partisipatif, mampu membentuk warga negara yang berdaya, demokratis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
ABSTRACT	
<i>Keywords:</i> Civic Education Merdeka Curriculum Democracy CELS Pancasila Student Profile	<i>Civic Education in Indonesia plays a strategic role in shaping democratic, active, and responsible citizens. This study focuses on the implementation of Civic Education in the Merdeka Curriculum and conceptually compares it with findings from the Citizenship Education Longitudinal Study (CELS). Using a qualitative descriptive method with a literature review approach, the study analyzes key sources on civic education and recent curriculum documents. The findings reveal that the Merdeka Curriculum integrates democratic values and human rights through project-based learning, the reinforcement of the Pancasila Student Profile, and the development of critical and collaborative thinking skills. Meanwhile, CELS highlights that contextual and continuous civic education significantly contributes to students' engagement in democratic processes. The study concludes that the integration of civic values into the curriculum, when supported by participatory learning strategies, has strong potential to cultivate empowered, democratic, and responsible citizenship.</i>

1. Pendahuluan

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga akan terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik (Rohana, 2018; Abdulatif & Dewi, 2021; Lisnawati et al., 2022). Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan dimasukkan ke dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Proses perancangan, pengembangan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajarannya dilakukan mengacu pada tujuan pendidikan nasional yang menekankan pembentukan insan yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan demokratis (Samsudin & Kidam, 2019; Sukriyatun, 2022). Kendati demikian, implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia belum sepenuhnya mampu menutup kesenjangan antara idealisme kurikulum dengan praktik di kelas. Studi menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kerap didominasi aspek kognitif (Yunita et al., 2025), dengan metode ceramah yang monoton sehingga peserta didik cepat bosan, kurang termotivasi, dan jarang terlibat aktif dalam diskusi kritis.

Kurikulum Merdeka hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan tersebut dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, penguatan Profil Pelajar Pancasila, serta pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif (Amanullah et al., 2023; Wulansari, 2023). Pendekatan ini dirancang untuk mendorong peserta didik menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan secara kontekstual, bukan sekadar normatif. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masih menghadapi kendala, seperti dominasi aspek kognitif, metode pembelajaran yang kurang variatif, dan lemahnya internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam konteks nyata. Permasalahan ini menimbulkan kesenjangan antara idealisme kurikulum dengan praktik di kelas, di mana aspek afektif dan psikomotor kerap terabaikan (Muin et al., 2022). Hal tersebut menuntut pembaruan strategi pembelajaran untuk memastikan bahwa nilai-nilai kewarganegaraan tidak hanya dipelajari tetapi juga dihayati dan diamalkan oleh peserta didik.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masih didominasi oleh ceramah konvensional yang bersifat satu arah, sehingga peserta didik kurang mendapatkan ruang untuk berdialog, berargumentasi, atau mengalami langsung nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan. Dalam konteks pembelajaran di sekolah, terdapat berbagai kendala yang menyebabkan hasil dari Pendidikan Kewarganegaraan belum dapat diimplementasikan secara optimal. Beberapa faktor penyebabnya antara lain rendahnya pemahaman guru mengenai pendekatan pembelajaran inovatif, seperti pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran partisipatif (Talahatu et al., 2024; Titaley & Situru, 2024), turut menjadi penghambat utama. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia mampu membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan demokratis sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional. Mengingat tantangan global yang semakin kompleks, sudah seharusnya Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfokus pada pengetahuan teoretis (Nanggala & Suryadi, 2020;

Sahi, 2024), tetapi juga pada penanaman nilai dan praktik demokrasi secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai perbandingan, menurut Keating et al., (2012) *Citizenship Education Longitudinal Study* (CELS) di Inggris menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan kontekstual, seperti simulasi demokrasi dan diskusi isu aktual, mampu meningkatkan keterlibatan sipil dan kesadaran demokratis peserta didik. CELS di Inggris merupakan penelitian *longitudinal* berskala besar di Inggris yang dilaksanakan oleh *National Foundation for Educational Research* (NFER) sejak 2001 untuk menganalisis dampak jangka panjang pendidikan kewarganegaraan terhadap pengetahuan, sikap dan partisipasi politik peserta didik berusia 11 – 18 tahun, dengan melibatkan lebih dari 18.000 peserta didik dari 300 sekolah melalui kuesioner, wawancara, dan analisis dokumen kurikulum. CELS menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan kontekstual, termasuk pelibatan peserta didik dalam simulasi demokrasi dan diskusi isu aktual, berpengaruh positif terhadap keterlibatan sipil dan kesadaran demokratis peserta didik.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Merdeka serta membandingkannya secara konseptual dengan temuan dari *Citizenship Education Longitudinal Study* (CELS). Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa pendidikan kewarganegaraan yang efektif tidak hanya bersifat deklaratif atau normatif, tetapi juga harus teruji secara empiris dalam membentuk pengetahuan, keterampilan, dan disposisi kewargaan yang demokratis. Nilai kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan dalam kajian ini terletak pada integrasi pendekatan *longitudinal* berbasis temuan CELS ke dalam konteks pendidikan Indonesia. Melalui kajian terhadap kurikulum, strategi pembelajaran, dan evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Merdeka, artikel ini mengusulkan model pembelajaran yang lebih kontekstual dan partisipatif. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memperkuat demokratisasi pendidikan, selaras dengan Hidayat (2022) dalam upaya global membangun kompetensi warga negara abad ke-21 yang berdaya kritis, toleran, dan mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakat plural.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif (Sari et al., 2024) dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum Merdeka dan membandingkannya dengan temuan *Citizenship Education Longitudinal Study* (CELS). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku teks, jurnal ilmiah, dokumen kurikulum, dan laporan penelitian Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dan Inggris. Analisis dilakukan dengan teknik *content analysis* terhadap implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Merdeka serta pendekatan CELS terhadap pembentukan warga negara.

Pendekatan studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan sintesis kritis dan sistematis atas berbagai hasil penelitian sebelumnya (Yusuf & Khasanah, 2019), sehingga temuan lebih komprehensif dan terhubung dengan konteks global. Menurut (Iqbal, 2014), metode *content analysis* sangat sesuai untuk menggali tema-tema laten dan pola narasi dalam dokumen kebijakan atau hasil studi empiris, sehingga dapat mengidentifikasi kesenjangan antara idealisme kurikulum dan praktik di kelas. Prosedur analisis meliputi tahap identifikasi sumber, pengumpulan data sekunder yang relevan, kategorisasi tema, serta interpretasi hasil dalam konteks pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sumber utama termasuk dokumen kurikulum nasional, hasil penelitian tentang Kurikulum Merdeka

(Amanullah et al., 2023; Wulansari, 2023), serta studi *longitudinal* CELS (Keating et al., 2012). Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam dan kontekstual mengenai peluang dan tantangan implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di era Kurikulum Merdeka.

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan (Pendidikan Kewarganegaraan) dalam Kurikulum Merdeka di Indonesia menunjukkan desain konseptual yang progresif dengan menekankan pembelajaran berbasis proyek, penguatan Profil Pelajar Pancasila (Pratama, 2023), dan pengembangan kompetensi abad ke-21. Secara dokumen kebijakan, Kurikulum Merdeka dirancang untuk memfasilitasi peserta didik dalam menginternalisasi nilai-nilai demokrasi melalui pengalaman belajar kontekstual, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, serta sikap toleran. Konsep ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan normatif-deklaratif menuju pembelajaran yang bersifat reflektif dan partisipatif. Namun, hasil studi literatur menunjukkan bahwa di tingkat implementasi sekolah, konsep tersebut masih menghadapi tantangan signifikan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara idealisme kurikulum dengan praktik pengajaran di kelas.

Temuan analisis menunjukkan bahwa sebagian besar guru Pendidikan Kewarganegaraan belum optimal mengintegrasikan model pembelajaran berbasis proyek secara sistematis. Banyak guru yang masih mengandalkan metode ceramah konvensional dengan pola satu arah (Nurjanah & Mustofa, 2024; Risana et al., 2025). Pola ini membuat peserta didik cenderung pasif dan lebih diarahkan pada penguasaan pengetahuan kognitif tentang norma, hukum, atau nilai-nilai Pancasila tanpa memberi ruang untuk eksplorasi makna, refleksi kritis, dan penerapan dalam konteks sosial mereka. Akibatnya, kompetensi afektif dan psikomotor, seperti kemampuan berdialog, berargumentasi, menyelesaikan konflik secara demokratis, serta mengambil keputusan kolektif, kurang terasah secara signifikan.

Selain itu, keterbatasan pemahaman dan keterampilan pedagogis guru menjadi faktor penentu yang turut menjelaskan ketidaksesuaian antara desain kurikulum dengan implementasinya. Guru umumnya belum terlatih secara memadai untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang menuntut perencanaan kolaboratif, asesmen autentik, serta fasilitasi diskusi terbuka dan refleksi kritis. Studi literatur memperlihatkan bahwa pengembangan profesional guru untuk menguasai metode partisipatif masih bersifat sporadis dan tidak merata. Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan guru merancang skenario pembelajaran yang mendorong peserta didik berperan aktif dalam memecahkan masalah sosial, mengelola perbedaan pendapat, atau melakukan tindakan sosial nyata di lingkungan sekitar.

Di sisi lain, kendala implementasi juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural di sekolah. Banyak sekolah menghadapi keterbatasan sumber daya seperti bahan ajar kontekstual, media pembelajaran interaktif, atau waktu pembelajaran yang cukup untuk pengembangan proyek. Sekolah juga masih dipengaruhi oleh budaya pembelajaran eksaminatif (Ahdiyat & Barat, 2021) yang mengutamakan pencapaian nilai kognitif dalam ujian dibandingkan pengembangan karakter dan nilai demokrasi. Paradigma ini membuat guru merasa tertekan untuk menuntaskan target kurikulum berbasis konten, sehingga enggan melakukan pendekatan berbasis proyek atau diskusi yang dianggap memakan waktu lebih lama.

Jika dilihat dari perspektif teori pembelajaran konstruktivis, temuan ini menunjukkan adanya disonansi antara teori yang dianut Kurikulum Merdeka dan praktik kelas. Teori konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif melalui interaksi sosial, diskusi kritis, dan refleksi kontekstual (Salsabila & Muqowim, 2024; Azzahra et al., 2025;

Wahyuni et al., 2025). Dalam praktik yang ditemukan, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di banyak sekolah justru cenderung berorientasi pada transfer pengetahuan yang bersifat statis dan normatif. Peserta didik tidak memperoleh pengalaman otentik untuk memaknai konsep-konsep demokrasi melalui kegiatan partisipatif. Hal ini menghambat pengembangan keterampilan metakognitif yang penting untuk menilai isu-isu sosial secara kritis.

Lebih jauh, jika dibandingkan dengan temuan *Citizenship Education Longitudinal Study* (CELS) di Inggris, terlihat perbedaan mendasar dalam strategi implementasi dan pendekatan pedagogis. CELS menekankan pentingnya pengalaman belajar partisipatif seperti simulasi demokrasi, debat isu aktual, dan diskusi terbuka yang melibatkan peserta didik dalam analisis isu-isu publik yang relevan dengan kehidupan mereka. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik tidak hanya memahami nilai-nilai demokrasi secara teoritis tetapi juga mengembangkan sikap dan keterampilan untuk terlibat secara aktif dalam proses demokrasi. Penekanan pada konteks lokal dan pengalaman nyata dalam CELS juga membuktikan efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran politik dan komitmen kewargaan peserta didik.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pendekatan CELS bersifat longitudinal dan sistematis, melibatkan evaluasi berkelanjutan terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku kewargaan peserta didik selama masa sekolah. Hal ini menjadi pembeda penting dengan implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia yang cenderung kurang memiliki mekanisme evaluasi holistik untuk mengukur capaian afektif dan psikomotor. Penilaian pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia masih dominan berbasis ujian tulis dengan soal kognitif (Hasnunidah & Juli Wiono, 2019), sementara pengukuran keterampilan argumentasi (Atmojo et al., 2024), refleksi kritis, dan pengambilan keputusan demokratis belum menjadi komponen asesmen utama.

Dalam konteks teori pendidikan demokratis, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia belum optimal dalam memfasilitasi peserta didik untuk mengalami proses deliberasi demokratis yang esensial. Teori pendidikan demokratis menekankan pentingnya sekolah sebagai arena praktik demokrasi di mana peserta didik belajar mendengarkan, merespons pandangan berbeda, dan mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Praktik kelas di Indonesia masih cenderung menempatkan guru sebagai pusat otoritas pengetahuan dan pengambil keputusan tunggal (Edi, 2025), sehingga dialog setara dan partisipasi peserta didik kurang berkembang (Komariah & Wahyuni, n.d.; Susanti et al., 2023). Kondisi tersebut menyebabkan kurang optimalnya penanaman nilai-nilai demokrasi yang relevan dengan konteks nyata dan mudah diterapkan.

Selain itu, dalam perspektif teori perkembangan moral, pembelajaran yang terlalu berorientasi pada hafalan nilai-nilai Pancasila tanpa pengujian kritis dapat menghasilkan moralitas heteronom, yaitu ketaatan pada norma tanpa pemahaman mendalam atau komitmen personal. Pendekatan seperti ini kurang mendukung perkembangan moral otonom yang ditandai dengan kemampuan peserta didik untuk merasionalisasi nilai, mengambil keputusan etis secara mandiri, dan bertanggung jawab atas pilihannya. CELS menunjukkan bahwa pembelajaran partisipatif yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dapat membantu transisi dari moralitas heteronom ke moralitas otonom.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menjawab tujuan penelitian yang ingin menganalisis implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Merdeka dan membandingkannya dengan temuan CELS. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Kurikulum Merdeka menawarkan rancangan pembelajaran kontekstual, berbasis proyek, dan berorientasi profil Pelajar Pancasila, pada tingkat implementasi sekolah masih terdapat dominasi pendekatan konvensional yang bersifat kognitif-deklaratif. Dibandingkan dengan CELS yang

menunjukkan efektivitas pendekatan partisipatif-kontekstual dalam membangun keterlibatan sipil, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia memerlukan transformasi mendalam pada level pedagogi, pelatihan guru, evaluasi, dan budaya sekolah.

Dengan demikian, untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme kurikulum dan praktik, dibutuhkan strategi pengembangan profesional guru yang lebih sistematis untuk menguasai pendekatan pembelajaran partisipatif. Selain itu, desain asesmen perlu diperluas untuk mencakup capaian afektif dan psikomotor seperti keterampilan argumentasi, refleksi kritis, dan kemampuan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif. Integrasi model CELS ke dalam konteks Indonesia menuntut adaptasi terhadap budaya lokal dan kesiapan sistem pendidikan nasional, tetapi prinsip utamanya tentang pembelajaran kontekstual dan partisipatif menjadi acuan penting untuk reformasi Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih relevan dengan tantangan demokrasi abad ke-21.

4. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian artikel ini. Secara khusus, penghargaan disampaikan kepada rekan-rekan peneliti yang telah berbagi sumber literatur dan ide kritis, serta kepada dosen pembimbing yang memberikan arahan konstruktif selama proses penulisan. Terima kasih juga kepada institusi pendidikan dan lembaga yang menyediakan akses data sekunder dan dokumen kurikulum yang menjadi bahan analisis utama. Semoga kontribusi semua pihak dapat menjadi amal pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih kontekstual dan partisipatif.

5. Daftar Pustaka

- Abdulatif, S., & Dewi, D. A. (2021). Peranan pendidikan kewarganegaraan dalam membina sikap toleransi antar siswa. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar (JPPGuseda)*, 4(2), 103–109.
- Ahdiyat, M., & Barat, B. K. B. (2021). Pancasila Dari Dan Dalam Ruang Ruang Pembelajaran. *Merdeka Belajar Dan Kemerdekaan Pendidik*, 100.
- Amanullah, A. S. R., Rachma, Z. S., & Syarifah, S. N. (2023). Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Kurikulum Merdeka untuk PAUD. *ALMURTAJA: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(2), 45–53.
- Atmojo, I. R. W., Adi, F. P., Ardiansyah, R., & Saputri, D. Y. (2024). *Pembelajaran Berdiferensiasi (Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka)*. CV Pajang Putra Wijaya.
- Azzahra, N. T., Ali, S. N. L., & Bakar, M. Y. A. (2025). Teori Konstruktivisme Dalam Dunia Pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2(2), 64–75.
- Edi, M. G. P. (2025). FILSAFAT PENDIDIKAN. *Filsafat Pendidikan*, 99.
- Hasnunidah, N., & Juli Wiono, W. (2019). *ARGUMENT-DRIVEN INQUIRY, GENDER, DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETERAMPILAN ARGUMENTASI*.
- Hidayat, O. T. (2022). *Pendidikan Multikultural Menuju Masyarakat 5.0*. Muhammadiyah University Press.

- Iqbal, M. (2014). *Konsep Neomodernisme dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam: Studi Paradigmatik Pemikiran Fazlur Rahman*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Keating, A., Benton, T. O. M., & David, D. A. N. (2012). *KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH*. 57–72.
- Komariah, S., & Wahyuni, S. (n.d.). *MERDEKA BELAJAR: Konstruksi Pedagogi Kritis Dalam Kurikulum Merdeka*. UNISMA PRESS.
- Lisnawati, A., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2022). Penerapan pembelajaran PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN untuk meningkatkan minat belajar pada siswa SD. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 652–656.
- Muin, A., Fakhruddin, A., Makruf, A. D., & Gandi, S. (2022). *Pengembangan Kurikulum Merdeka*.
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2020). Analisis konsep kampus merdeka dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10–23.
- Nurjanah, E. A., & Mustofa, R. H. (2024). Transformasi pendidikan: Menganalisis pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka pada 3 SMA penggerak di Jawa Tengah. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(1), 69–86.
- Pratama, M. A. (2023). Peran Model Project Based Learning dalam Penerapan Kurikulum Merdeka. *Kajian Pendidikan Dalam Berbagai Aspek*, 99.
- Risana, F., Hadi, A. I. M., Pratama, A., Rahmah, F., & Syafe'i, I. (2025). Transformasi metode pembelajaran pendidikan agama Islam: Dari konvensional ke pendekatan student-centered learning. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(01), 619–632.
- Rohana, C. (2018). *Upaya untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada Mata Pelajaran PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Pokok Bahasan Kewajiban Hak dan Tanggung Jawab sebagai Warga Masyarakat dengan menggunakan model pembelajaran Tipe Question Student Have: Penelitian tindakan kelas terhadap kelas V M*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sahi, Y. (2024). PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN:(Kajian Konseptual, Perbandingan, dan Relevansinya sebagai Sarana Pendidikan Politik). *JURNAL POLAHI*, 2(3), 80–94.
- Salsabila, Y. R., & Muqowim, M. (2024). Korelasi antara teori belajar konstruktivisme lev vygotsky dengan model pembelajaran problem based learning (pbl). *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(3), 813–827.
- Samsudin, M., & Kidam, K. (2019). Analisis Terhadap Arah Dan Tujuan Pendidikan Nasional Pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2005–2025. *Al Ashriyyah*, 5(1), 67–82.
- Sari, H. T. W., Wiranata, I. H., Hanggara, G. S., & Sasmita, W. (2024). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Program Kampus Mengajar Angkatan 7 Sebagai Upaya Membumikan Nilai-Nilai Pancasila. *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran)*, 7, 284–293.
- Sukriyatun, G. (2022). Pendidikan karakter pada kurikulum 2013 dan perkembangannya menuju profil pelajar Pancasila. *Primer Edukasi Journal*, 1(2), 23–37.

- Susanti, L., Handriyantini, E., & Hamzah, A. (2023). *Guru Kreatif Inovatif Era Merdeka Belajar*. Penerbit Andi.
- Talahatu, L., Purwanto, E. J., & Silalahi, S. (2024). Strategi Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Implementasi Pembelajaran Berbasis Proyek di SMA Negeri 6 Buru. *Jurnal Ilmiah Guru Madrasah*, 3(2), 65–76.
- Titaley, D. M., & Situru, D. P. (2024). PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DALAM PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN INOVATIF DI SMP NEGERI 1 NABIRE. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 3(12), 1249–1256.
- Wahyuni, S., Hidayat, N., & Hapsari, F. (2025). KURIKULUM PENDIDIKAN DARI PERSPEKTIF FILOSOFI PROGRESIVISME, HUMANISME DAN KONTRUKSIVISME: KAJIAN PUSTAKA. *Research and Development Journal of Education*, 11(1), 20–28.
- Wulansari, S. (2023). Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Berbasis Budaya Islam pada Dimensi Bernalar Kritis untuk Usia 5-6 Tahun di TK Islam Hidayatullah Semarang. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 3(03), 519–528.
- Yunita, S., Milala, E. B., Siregar, M., Gaol, R. L., & Panjaitan, R. (2025). Analisis Kritis Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Indonesia. *Indonesian Journal of Learning Studies (IJLS)*, 5(2), 69–78.
- Yusuf, S. A., & Khasanah, U. (2019). Kajian literatur dan teori sosial dalam penelitian. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, 80, 1–23.